

Sidang Kasus Terorisme Farid Okbah di PN Jakarta Timur Digelar Tertutup

JAKARTA (IM) – Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menggelar sidang tertutup atas perkara terorisme dengan terdakwa Farid Okbah. Berdasarkan jadwal, sidang digelar di ruang sidang Ali Said, SH dimulai sekitar pukul 09.00 WIB, namun masih terpantau sepi.

Berdasarkan pantauan MPI, mulai sekira pukul 09.15 WIB tidak nampak adanya pengawalan ketat di sekitar ruang sidang. Namun, ruang sidang dikunci rapat-rapat dari dalam ruangan.

“Sidang dengan nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim atas jenis perkara Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan terdakwa FARID AHMAD OKBAH. M.A. BIN ACHMAD OKBAH. Alm, dihelat dengan agenda pemeriksaan saksi,” tulis keterangan jadwal sidang yang dikutip dari laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (26/9).

Diketahui, selain Farid Okbah, dalam sidang tersebut juga menghadirkan terdakwa lainnya yakni Anung Al Hamat. Selain itu, dalam sidang pemeriksaan saksi tersebut, majelis hakim menghadirkan Sembilan kasus terorisme guna lanjutan perkara pendanaan organisasi Jamaah Islamiyah (JI).

Kesembilan saksi tersebut dihadirkan guna memberikan kesaksian yang memberatkan terdakwa Ustadz Farid Ahmad Okbah dkk dari Gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ciracas, Jakarta Timur.

“Jadi kesembilan saksi napiter ini akan dihadirkan secara virtual dalam sidang hybrid. Mereka ada di Gedung LPSK sebagai bagian dari tugas perlindungan kami untuk menjamin keselamatan mereka terutama saat kembali ke lapas,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi kepada wartawan di Bandung, Sabtu 24 September 2022.

Menurut Edwin, sidang yang dilaksanakan dalam dua kali agenda yakni pada Senin (26/9) dan Rabu 28 September 2022, memisahkan pemeriksaan dari kesembilan saksi tersebut.

“Untuk hari Senin, ada tiga saksi yang hadir sedangkan Rabu depannya, enam saksi lainnya,” ujar Edwin.

Sebelumnya, Farid Okbah dkk ditangkap Densus 88 Antiteror Mabes Polri di Bekasi pada 16 November 2021. Nama-nama para saksi dalam perkara pengalangan dana kepada JI ini dirahasiakan. Sidang perdana perkara ini telah digelar pada 31 Agustus 2022. ● han

Polhukam

FOTO: ANT



IPW Diusir Pamdal DPR, MKD: Kami Minta Maaf, Petugasnya Sudah Ditegur

IPW batalkan beri keterangan ke MKD DPR karena dilarang memasuki gedung DPR melalui pintu depan. Katanya, pintu masuk depan hanya untuk anggota DPR saja.

JAKARTA (IM) - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, atas perlakuan petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI yang mengusirnya saat hendak memenuhi panggilan MKD sebagai saksi.

“Kami atas nama MKD DPR mohon maaf kepada Pak Sugeng Teguh Santoso atas ketidaknyamanan yang terjadi hari ini,” kata Wakil Ketua

MKD DPR Habiburokhan saat dihubungi, Senin (26/9).

Habib mengaku, pihaknya juga sudah menegur keras Pamdal DPR yang tadi bertugas di Gerbang depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Kami juga telah menegur keras Pamdal yang tadi bertugas,” ujarnya.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, pada prinsipnya adalah DPR harus memperlakukan tamu dengan hormat karena DPR adalah rumah rakyat.

“Prinsipnya kita harus memperlakukan tamu dengan hormat, DPR adalah rumah rakyat,” tegas Anggota Komisi III DPR ini.

Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso membatalkan keahadirannya dalam sidang MKD DPR di Gedung Nusantera I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (26/9) pukul 11.00 WIB.

Hal itu lantaran Ketua IPW merasa mendapatkan perlakuan tidak hormat dari petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR di Gerbang Depan Kompleks Parlemen, dengan alasan pintu tersebut dikhususkan untuk anggota dewan.

“IPW membatalkan kehadiran ke MKD DPR RI karena adanya diskriminasi perlakuan dan sikap tidak hormat pimpinan DPR pada

warga negara yang akan memasuki gedung DPR melalui pintu depan. Pasalnya, pintu masuk depan hanya diperuntukkan kepada anggota dewan saja,” kata Sugeng dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (26/9).

Sugeng menjelaskan, sebelumnya ia mendapat undangan dari MKD DPR untuk hadir pada Senin 26 September 2022 pukul 10.40 WIB.

Kesediaan IPW ini sebagai wujud penghormatan terhadap tugas MKD. Dan, komunikasi berlanjut saat dirinya menuju ke Gedung DPR, namun ia diminta melewati gerbang belakang meski sudah menunjukkan surat undangan. ● han

RDP KOMISI I DENGAN MENHAN, PANGLIMA TNI DAN KEPALA STAF TNI

Menhan Prabowo Subianto (keterkaitan) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kiri), Kasal Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) dan Kasal Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kanan) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9). Rapat Dengar Pendapat tersebut membahas mengenai penyesuaian RKA Kemhan/TNI TA 2023.

JAKARTA (IM) - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, atas perlakuan petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI yang mengusirnya saat hendak memenuhi panggilan MKD sebagai saksi.

“Kami atas nama MKD DPR mohon maaf kepada Pak Sugeng Teguh Santoso atas ketidaknyamanan yang terjadi hari ini,” kata Wakil Ketua

MKD DPR Habiburokhan saat dihubungi, Senin (26/9).

Habib mengaku, pihaknya juga sudah menegur keras Pamdal DPR yang tadi bertugas di Gerbang depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Kami juga telah menegur keras Pamdal yang tadi bertugas,” ujarnya.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, pada prinsipnya adalah DPR harus memperlakukan tamu dengan hormat karena DPR adalah rumah rakyat.

“Prinsipnya kita harus memperlakukan tamu dengan hormat, DPR adalah rumah rakyat,” tegas Anggota Komisi III DPR ini.

Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso membatalkan keahadirannya dalam sidang MKD DPR di Gedung Nusantera I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (26/9) pukul 11.00 WIB.

Hal itu lantaran Ketua IPW merasa mendapatkan perlakuan tidak hormat dari petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR di Gerbang Depan Kompleks Parlemen, dengan alasan pintu tersebut dikhususkan untuk anggota dewan.

“IPW membatalkan kehadiran ke MKD DPR RI karena adanya diskriminasi perlakuan dan sikap tidak hormat pimpinan DPR pada

warga negara yang akan memasuki gedung DPR melalui pintu depan. Pasalnya, pintu masuk depan hanya diperuntukkan kepada anggota dewan saja,” kata Sugeng dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (26/9).

Sugeng menjelaskan, sebelumnya ia mendapat undangan dari MKD DPR untuk hadir pada Senin 26 September 2022 pukul 10.40 WIB.

Kesediaan IPW ini sebagai wujud penghormatan terhadap tugas MKD. Dan, komunikasi berlanjut saat dirinya menuju ke Gedung DPR, namun ia diminta melewati gerbang belakang meski sudah menunjukkan surat undangan. ● han

Bahkan, kata dia, komunikasi dengan staf MKD DPR sudah berjalan sejak tanggal 23 September 2022 kemarin. Dalam komunikasi tersebut, IPW menegaskan akan hadir pada 26 September 2022 pukul 10.40 WIB.

Kesediaan IPW ini sebagai wujud penghormatan terhadap tugas MKD. Dan, komunikasi berlanjut saat dirinya menuju ke Gedung DPR, namun ia diminta melewati gerbang belakang meski sudah menunjukkan surat undangan. ● han

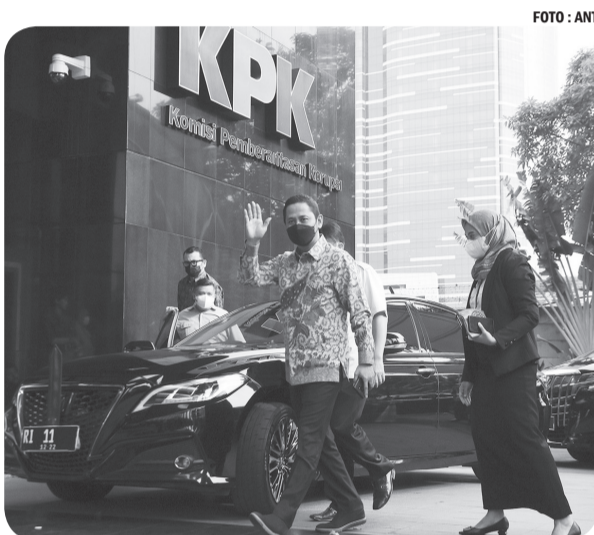


FOTO: ANT

KETUA KOMISI YUDISIAL DATANGI KPK

Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata (kedua kanan) menyapa wartawan saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9/2022). Kunjungan Ketua Komisi Yudisial tersebut dalam rangka koordinasi antar lembaga terkait pemeriksaan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajat Dimiyati yang terjerat kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Pengacara Lukas Enembe Tuduh KPK Jerat Kliennya dengan Cara-cara Intelijen

JAKARTA (IM) - Gubernur Papua Lukas Enembe menampik semua tuduhan yang dilayangkan KPK terhadapnya. Bahkan KPK dituduh menjerat kliennya dengan cara-cara intelijen.

“Ini kan saya selalu bilang, ini politisasi dan kriminalisasi, ketika mereka (KPK) gagal membangun skenario menangkap Pak Gubernur pada 12 September 2022 dan menetapkan Pak Gubernur sebagai tersangka gratifikasi Rp 1 miliar, publik tidak percaya, akhirnya mereka membangun framing baru yang Rp560 miliar itu, mereka merusak nama besar Gubernur Papua, ini kerja-kerja intelijen bukan penegakan hukum,” ungkap Roy saat dihubungi wartawan, Senin (26/9).

Roy menyebut bahwa informasi yang menyebut adanya aliran dana hasil korupsi Lukas Enembe Rp560 miliar mengalir ke kasino di Singapura adalah hoaks.

Pihaknya telah membukukan tuduhan yang dikeluarkan KPK tersebut, di mana dari hasil penelusuran tim kuasa hukum Gubernur Papua tidak pernah ditemukan dana sebesar Rp560 miliar ke luar dari Pemprov Papua mengalir ke kasino seperti yang dituduhkan.

Demikian juga soal kepemilikan tambang emas milik Gubernur Papua, menurut Roy hal itu tidak pernah ada.

“Bukan, itu persoalannya itu juga tidak pernah ada (tambang). Jadi sekarang ini kan Pak Gubernur dituduh hasil korupsi yang disetor ke kasino, sekarang tugasnya itu kita sudah membuktikan bahwa tidak ada dana yang keluar dari Pemda Rp560

miliar yang kemudian dipakai Pak Gubernur untuk main judi, itu hoaks, tidak benar,” ujarnya.

Soal aktivitas Lukas Enembe yang beberapa kali diketahui bepergian ke Singapura untuk bermain judi, Roy tak menampik hal tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan Lukas Enembe di Singapura, juga dilakukan oleh pejabat lainnya di Indonesia, yaitu bermain judi.

“Ya biasanya, bukan hanya Pak Gubernur, semua pejabat kita sering main di sana,” ucap Roy.

Terkait proses hukum oleh KPK terhadap Lukas Enembe, Roy memastikan bahwa hal tersebut adalah politisasi di mana sebelumnya KPK telah gagal membangun skenario penangkapan terhadap Lukas Enembe dengan tuduhan menerima gratifikasi senilai Rp 1 Miliar.

Adapun, menurut Roy dukungan terhadap Lukas Enembe oleh massa pendukungnya selama ini hal tersebut sebagai bukti bahwa Lukas Enembe mendapat tempat di hati rakyat Papua, apalagi Lukas Enembe merupakan Kepala Suku Besar Rakyat Papua, pemimpin Politik yang sangat dicintai rakyatnya.

Aksi demonstrasi massa pendukung Gubernur Lukas Enembe beberapa hari lalu menurut Roy sebagai aksi spontanitas rakyat. Lukas menurut Roy hanya mewantiwanti para simpatisannya untuk melaksanakan demonstrasi secara damai dan tertib.

“Banyak masyarakat menemuhi Pak Lukas dan bilang ‘bapak kami mau demo’, Pak Lukas bilang itu hak kalian, tapi saya ingatkan harus damai, jangan korbarkan rakyat,” kata Roy. ● han

Giliran Effendi Simbolon Absen saat Panglima TNI dan KSAD Hadir di DPR

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Effendi Simbolon justru tidak menghadiri saat rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, hingga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Effendi disebut sedang mendapat tugas dari Fraksi PDI-P sehingga tak bisa ikut rapat.

“Penjelasan dari Ketua Fraksi PDI-P, Pak Utut, (Effendi) dapat tugas dari fraksi, sehingga tidak dapat ikut rapat,” ujar anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Tb Hasanuddin saat dimintai konfirmasi, Senin (26/9).

Tb Hasanuddin mengaku tidak tahu tugas fraksi apa yang diberikan terhadap Effendi Simbolon. Pasalnya, Tb Hasanuddin tidak sempat bertanya lebih rinci kepada Utut Adianto selaku Ketua Fraksi PDI-P.

“Tanya Pak Utut ya,” ucapnya. Adapun rapat ini dihadiri oleh Prabowo, Andika, Dudung, hingga Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono.

Duduknya Dipisahkan Prabowo

Komisi I DPR menggelar rapat bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan seluruh kepala staf TNI, Senin (26/9).

Rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelar di ruang rapat Komisi I DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dilakukan secara tertutup. Rapat hari ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Muetya Hafid.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman hadir dalam rapat tersebut. Posisi duduk Andika dan Dudung dipisahkan Prabowo. Namun ada yang unik dari formasi tempat duduk Jenderal Andika dan Jenderal Dudung.

Keduanya duduk sejajar namun diselingi oleh Prabowo Subianto. Sementara KSAL Laksamana Yudo Margono yang juga hadir dalam rapat duduk tepat di samping Andika. KSAN Marsekal Fadjad Prasetyo tampak tidak hadir dalam rapat namun akan hadir belakangan.

“Bahwa hari ini, Pak KSAU ada bantuan kemanusiaan untuk korban banjir mendampingi Presiden. Suratnya ada. Nanti, kalau Bapak Ibu ingin melihat suratnya, sudah diberikan kepada Komisi I, namun diusahakan (hadir) menyusul,” kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid saat membuka rapat.

Pada rapat kerja di Komisi I DPR sebelumnya, Dudung tak hadir, dan membuat isu keretakan antara Panglima TNI dengan KSAD mencuat ke permukaan.

Salah satu anggota DPR Effendi Simbolon pun menyinggung soal disharmonisasi antara Andika, dan Dudung. Namun, kehadiran Dudung pada hari ini seolah menepis isu tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI Tb Hasanuddin menegaskan, tidak ada keretakan yang terjadi di antara keduanya.

“Memang enggak ada (masalah), saya sudah bicara Pak dudung hadir, tanda enggak ada masalah. Memang tidak ada, saya sudah bicara baik dengan Panglima maupun KSAD,” kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/9). ● han



FOTO: ANT

PERTEMUAN KOMNAS HAM DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (tengah), Anggota Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara (kedua kiri) Anggota Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (kiri) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Jhon NR Gobay (kedua kanan) saat memberikan keterangan pers terkait kasus-kasus warga Papua di Gedung Komnas HAM Jakarta, Senin (26/9). Pertemuan tersebut membahas kasus di Papua antara lain kasus mutilasi melibatkan prajurit TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka.

Pengembangan Kasus Suap RAPBD Jambi, Penyidik KPK Periksa Anggota DPR Sofyan Ali

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 10 saksi terkait pengembangan kasus suap pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK telah menetapkan puluhan tersangka terkait pengembangan perkara tersebut.

KPK masih enggan memberikan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Demikian juga terkait konstruksi perkaranya. KPK berjanji mengumumkan secara resmi konstruksi perkara serta pihak-pihak yang telah ditetapkan tersangka setelah proses penyidikan cukup.

“Dalam hal kronologi dugaan perbuatan pidana, siapa saja yang menjadi tersangka maupun sangkaan pasal segera kami akan sampaikan setelah proses penyidikan telah cukup,” ujar Ali.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan puluhan orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap ketok palu penelesaian RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Salah satu tersangka perdana dalam perkara ini adalah mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Selain Zumi Zola, KPK menetapkan para pejabat pada Pemprov Jambi lainnya sebagai tersangka. Bahkan, anggota DPRD Jambi juga sudah banyak yang dijerat dalam perkara ini. Mayoritas para tersangka sudah diputus bersalah oleh pengadilan. ● han

Prabowo Ingatkan Ini ke Cak Imin yang Mau Jadi Cawapresnya Puan

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab dipanggil Cak Imin, memiliki hak untuk menentukan pasangannya sendiri saat maju di Pilpres 2024. Namun, Prabowo mengingatkan Cak Imin soal “kesepakatan”.

Seperti diketahui, Cak Imin terang-terangan mengutarakan keinginannya ingin menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Ketua DPP PDI-P Puan Maharani jika maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

“Ya itu hak beliau. Tapi kan kita sudah ada kesepakatan,” ujar Prabowo saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (26/9).

Prabowo mengaku bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan Cak Imin perihal keinginan Ketum PKB itu maju sebagai cawapres. Menurut dia, sejauh ini perkembangan yang ada masih terus berproses. Meski demikian, Prabowo menghargai pertemuan Puan dan Cak Imin di Kalibata,

Jakarta Selatan, kemarin. “Bagus. Bagus dong,” ucapnya.

PKB sebenarnya sudah berkoalisi dengan Partai Gerindra. Partai Gerindra sendiri mendeklarasikan akan mengungsung ketua umum mereka, Prabowo Subianto, sebagai capres. Cak Imin sebelumnya berseloroh dirinya akan meminta izin kepada Prabowo terlebih dahulu jika ingin Puan yang menjadi Presiden.

“Ya nanti tanya Pak Prabowo dulu hahaha. Tapi perjalanan masih panjang. Nanti dices saja Prabowo-Cak Imin, Puan-Cak Imin,” imbuh Cak Imin. ● mei

BERITA KEHILANGAN	
Telah Kehilangan Sertifikat Hak Milik :	
1. SHGB No. 4334/Pluit, a.n SURJA TANARY (TAN CHING KWANG, seluas 642 m2 terletak di Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	
Kehilangan tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwajib	
Jakarta, 27 September 2022	
Direksi	
PT. DAINANG GALINGGING UTAMA	